

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah bangsa Indonesia bahkan hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus saja memberikan informasi banyaknya jumlah penduduk miskin, yaitu sekitar 18 persen atau lebih-kurang 30 ribu jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah itu tentu saja bersifat dinamis, dalam arti masih sangat mungkin akan terjadi peningkatan mengingat kondisi perekonomian nasional masih belum stabil.

Harus diakui, pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini terbukti telah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Terlepas dari soal setuju atau tidak, kita tidak bisa memungkiri bahwa masalah kemiskinan memang ada di sekitar kita. Tiap bencana alam yang terjadi, senantiasa membuka tabir masih adanya kemiskinan di kampung-kampung perkotaan maupun desa-desa yang terkena bencana.

Taraf hidup di bawah garis kemiskinan, kondisi gizi yang rendah, pendidikan yang serba memprihatinkan, perikehidupan yang dilingkari kemelaratan, sering mewarnai daerah-daerah yang terkena bencana. Dalam dinamika pembangunan, memang pada satu sisi telah mampu meningkatkan pendapatan sebagian penduduk, tetapi bersamaan dengan itu juga terdapat penduduk miskin yang absolut. Ini berarti menjadi indikator bahwa pendapatan

nasional masih belum terdistribusi secara merata. Menurut Bank Dunia, proporsi pembagian pendapatan nasional di negara-negara berkembang senantiasa menuju ketidakseimbangan antara jumlah penduduk miskin dan juga penduduk kaya. Dengan jumlah penduduk miskin yang jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk kaya.

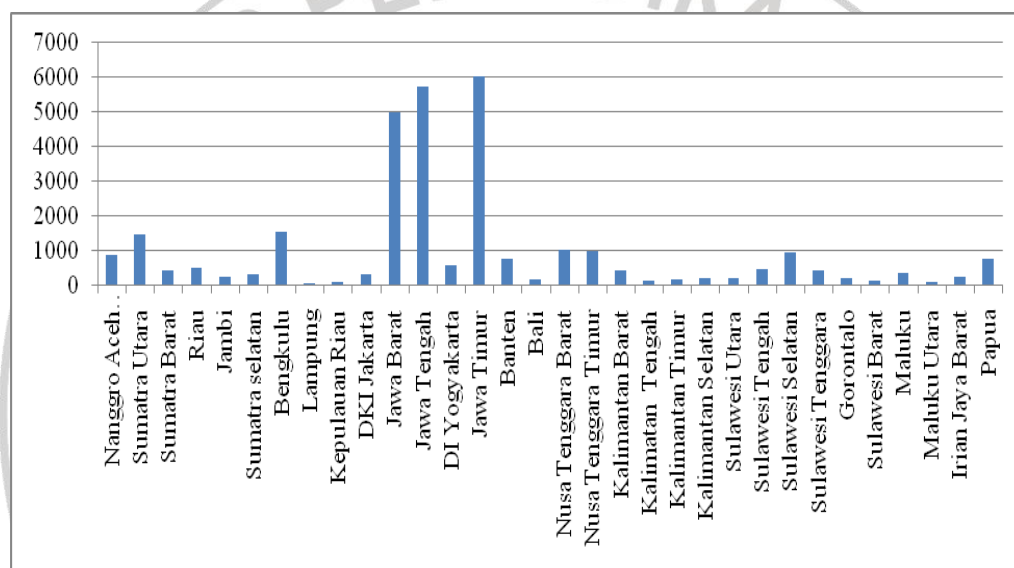
Dalam studi akademik, penyebab kemiskinan meliputi tiga unsur: kemiskinan yang disebabkan oleh hambatan badaniah atau mental seseorang, kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam dan kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan ini sering dikenal sebagai kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh manusia, dari manusia, dan terhadap manusia pula. Artinya, kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur buatan manusia, baik struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemiskinan buatan itu timbul dan dimantapkan oleh berkembangnya sikap *nrimo*, sebagai nasib, dan sikap *neglect*, atau sikap tidak menghiraukan, menganggap enteng dan tidak penting.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Kemiskinan Antar Propinsi Di Indonesia
Tahun 2009

| No | Propinsi | Jumlah Penduduk Miskin (000) |
|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Nanggro Aceh Darussalam | 892,9 |
| 2 | Sumatra Utara | 1 499,7 |
| 3 | Sumatra Barat | 429,3 |
| 4 | Riau | 527,5 |
| 5 | Jambi | 249,7 |
| 6 | Sumatra selatan | 324,1 |
| 7 | Bengkulu | 1 558,3 |
| 8 | Lampung | 76,6 |
| 9 | Kepulauan Riau | 128,2 |
| 10 | DKI Jakarta | 323,2 |
| 11 | Jawa Barat | 4 983,6 |
| 12 | Jawa Tengah | 5 725,7 |
| 13 | DI Yogyakarta | 585,8 |
| 14 | Jawa Timur | 6 022,6 |
| 15 | Banten | 788,1 |
| 16 | Bali | 181,7 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 1 050,9 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 1 013,1 |
| 19 | Kalimantan Barat | 434,8 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 165,9 |
| 21 | Kalimantan Timur | 176,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 239,2 |
| 23 | Sulawesi Utara | 219,6 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 489,8 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 963,6 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 434,3 |
| 27 | Gorontalo | 224,6 |
| 28 | Sulawesi Barat | 158,2 |
| 29 | Maluku | 380,0 |
| 30 | Maluku Utara | 98,0 |
| 31 | Irian Jaya Barat | 256,8 |
| 32 | Papua | 760,3 |
| | Indonesia | 32 530,0 |

Sumber: BPS, *Jabar in Figures* 2010

Dari Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 perkembangan jumlah kemiskinan antar Propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa, Jawa Barat menduduki peringkat ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peringkat pertama yaitu Jawa Timur, peringkat kedua yaitu Jawa Tengah. Oleh karena itu, penting untuk mendalami kita yang merupakan masyarakat Jawa Barat untuk mendalami masalah kemiskinan di Jawa Barat.



Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Kemiskinan Antar Propinsi Di Indonesia
Tahun 2009

Masyarakat Jawa Barat memiliki kesamaan pemahaman tentang kemiskinan yang sebagian besar didasarkan pada situasi ekonomi rumah tangga. Umumnya, warga dianggap miskin jika mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pakaian. Selain itu, masyarakat Jawa Barat memiliki konsep kehidupan yang baik dan kehidupan yang buruk, yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, fisik, dan emosional. Konsep setempat ini sangat mirip dengan konsep kesejahteraan (*wellbeing*) dan kesengsaraan

(*illbeing*). Untuk lebih jelas, berikut ini merupakan data jumlah penduduk miskin di Jawa Barat yang disajikan dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Jawa Barat Tahun 2003-2009

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) |
|-------|---|
| 2003 | 4898,8 |
| 2004 | 5229,8 |
| 2005 | 5137,6 |
| 2006 | 5712,5 |
| 2007 | 5457,9 |
| 2008 | 5249,6 |
| 2009 | 4852,5 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat berfluktuatif, padahal jumlah penduduk miskin, semestinya menurun dari tahun ke tahun. Fluktuatifnya jumlah penduduk miskin, menunjukkan terdapatnya berbagai masalah di Jawa Barat.

Dari Tabel 1.2 di atas menunjukkan terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 331,1 ribu jiwa. Pada tahun 2005 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 92,2 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 574,9 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Ternyata dampak kenaikan BBM diakhir tahun 2005 mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin yang drastis. Pada tahun 2007 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 254,6 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 208,3 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Krisis global yang terjadi, tidak berdampak pada jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, terbukti dari jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya. Pada tahun 2009 terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 397,1ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Permasalahan tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menunjukkan rendahnya kualitas pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Dalam penulisan ini, indikator untuk melihat tingkat kemiskinan di cerminkan dari tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin.

Desentralisasi tampak jelas memiliki sejumlah dampak positif terhadap kehidupan warga Jawa Barat. Pembentukan Kabupaten/Kota baru di Jawa Barat meningkatkan partisipasi politik dan hak menentukan nasib sendiri dari kelompok suku yang sebelumnya terpinggirkan ini. Dengan otonomi daerah, infrastruktur dan pelayanan pemerintah di berbagai sektor meningkat dan peluang-peluang ekonomi baru tumbuh. Indikator untuk mengukur keberhasilan desentralisasi dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK berasal dari APBN dan dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional contohnya adalah proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek yang dibiayai donor baik nasional maupun internasional. Kita ketahui bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas nasional. Berikut adalah data perkembangan DAK di Jawa Barat.

Tabel 1.3
Realisasi Dana Alokasi Khusus Di Jawa Barat Tahun 2003-2009

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) |
|-------|---|
| 2003 | 244.622.990 |
| 2004 | 129.888.610 |
| 2005 | 100.909.900 |
| 2006 | 819.401.347 |
| 2007 | 819.497.957 |
| 2008 | 994.225.000 |
| 2009 | 1.299.211.605 |

Sumber: *Realisasi APBD Menurut Komponen Penerimaan Badan Pusat Statistik (diolah)*

DAK di Propinsi Jawa Barat fluktuatif. Menurut **M. Suparmoko** (2002:43),

DAK berasal dari APBN dan dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Artinya, semakin besar DAK, berarti semakin besar dana yang dimiliki Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan khusus daerah dan semakin besar pula dana yang dimiliki, untuk mencapai prioritas nasional. Apabila dikelola dengan baik, DAK dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional (**Saikhu Usman**, 2008:5)..

Desentralisasi tampak jelas memiliki sejumlah dampak positif terhadap kehidupan warga Jawa Barat. Pembentukan Kabupaten/Kota baru di Jawa Barat meningkatkan partisipasi politik dan hak menentukan nasib sendiri dari kelompok suku yang sebelumnya terpinggirkan ini. Dengan otonomi daerah, infrastruktur dan pelayanan pemerintah di berbagai sektor meningkat dan peluang-peluang ekonomi baru tumbuh. Indikator untuk mengukur keberhasilan desentralisasi dilihat dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK berasal dari APBN dan

dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional contohnya adalah proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek yang dibiayai donor baik nasional maupun internasional. Kita ketahui bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas nasional. Berikut adalah data perkembangan DAK Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi harapan bagi Kabupaten/Kota agar mampu menciptakan berbagai lapangan kerja yang menciptakan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Jawa Barat. Dari Tabel 1.5 di bawah ini, akan terlihat jumlah kesempatan kerja di Jawa Barat yang tercermin dari jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 1.4
Jumlah Kesempatan Kerja Di Jawa Barat Tahun 2003-2009

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) |
|-------|---|
| 2003 | 14.795.297 |
| 2004 | 14.598.311 |
| 2005 | 15.011.002 |
| 2006 | 15.441.649 |
| 2007 | 15.853.795 |
| 2008 | 15.953.084 |
| 2009 | 16.340.407 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Permasalahan yang muncul adalah pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tambahan angkatan kerja yang muncul sekitar 2,5 juta setiap tahun, akibatnya jumlah pengangguran meningkat, sebesar 9,76 juta orang tahun 2001–2004. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin belum dapat diturunkan setelah pasca krisis, tercatat bahwa tahun 2002 penduduk miskin sebesar 38,4 juta jiwa dimana angka ini lebih besar jika dibandingkan sebelum krisis, yaitu sebesar 34,5 juta jiwa pada tahun 1996 (BPS, 2002).

Jelaslah terjadi suatu pengaruh antara: desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan, desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, oleh karena itu diharapkan Peningkatan kesempatan kerja yang terjadi, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur dan akan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat (2003-2009)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?
5. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?
6. Bagaimanakah pengaruh kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?
7. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan Ekonomi, dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan Ekonomi, dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai informasi tambahan bagi para civitas akademik dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- 2) Memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai masalah kemiskinan di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya mahasiswa untuk melakukan penelitian tindak lanjut mengenai kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

- 4) Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah agar kebijakan yang dilakukan dapat menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

